

Dari kedua pengertian di atas maka yang dimaksud dengan Proses adalah suatu runtutan peristiwa yang didalamnya terdapat bagian- bagian tertentu yang saling berhubungan dalam suatu perubahan.

Pengambilalihan Kekuasaan adalah perebutan kekuasaan (Pemerintah) secara paksa. Fuad Hasan (1988 :27) mendefinisikan Pengambilalihan Kekuasaan berasal dari kata ambil alih yang berarti menggantikan suatu kepemimpinan. Sedangkan Peter Salim mengartikan Pengambilalihan Kekuasaan adalah Proses perubahan sesuatu yang menjadi lain dari semula (Dalam Kepemimpinan). Dari kedua pendapat diatas maka Pengambilalihan Kekuasaan dapat diartikan sebagai Proses/usaha menggantikan suatu kepemimpinan.

Dari beberapa pendapat diatas maka yang dimaksud Proses Pengambilalihan Kekuasaan adalah tahapan-tahapan peristiwa yang dilakukan dalam upaya merebut dan menggantikan kekuasaan suatu pemerintahan atau golongan yang berkuasa.

Pengambilalihan Kekuasaan Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang terjadi di Lampung pasca diproklamirkannya berita kemerdekaan bangsa Indonesia di Lampung oleh Mr.Abbas yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945 bertempat di hotel Juliana Tanjung Karang. Adapun usaha pertama yang dilakukan oleh militer di Lampung pada saat itu adalah dengan membentuk Laskar seperti : pembentukan API (Angkatan Pemuda Indonesia), Pembentukan Penjaga Keamanan Rakyat, Pembentukan Barisan Pelopor dan Pembentukan TKR-Laut. Maka dengan adanya pembentukan berbagai Laskar tersebut merupakan usaha-usaha yang

dilakukan untuk dapat melakukan Pengambilalihan Kekuasaan Pemerintahan Pendudukan yang selama ini dikuasai oleh Militer Jepang.

#### **D. Konsep Laskar**

Laskar bermakna satuan bersenjata di luar tentara reguler, yang secara umum berafiliasi pada kepentingan politik tertentu. Anton M Moeliono (1988:501) mendefinisikan Laskar berarti Tentara, Kelompok, Serdadu. Sedangkan Prof. Dr. Suhartono W Pranoto mengartikan Laskar sebagai “Pemuda yang memiliki kekuatan fisik dan diorganisasikan secara rapi dan sangat efektif, baru muncul pada masa Pendudukan Militer Jepang”. Dari pengertian di atas maka yang dimaksud dengan Laskar adalah kelompok bersenjata yang merupakan satuan semangat juang untuk melawan golongan tertentu.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan penulis terhadap bapak Anhar Gonggong pada tanggal 8 juni 2011 bertempat di Museum Kebangkitan Nasional (Stovia), beliau menyebutkan “ Apapun latar belakang, apapun namanya, entah itu eks Giyugun, Heiho, Peta dsb mereka adalah Laskar-Laskar yang Teroganisir Heroik yang nantinya menjadi Cikal Bakal Tentara yang sebenarnya”.

#### **E. Konsep Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang**

Pemerintahan adalah sistem menjalankan wewenang dalam kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara/bagian-bagiannya (Hasan

Alwi,2002:723). Adapun yang dimaksud Pemerintah dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Militer. Pemerintahan Militer adalah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan militer atau pemerintah yang mengatur negara secara militer. Sifat Pemerintah Militer adalah keras dan disiplin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa Pemerintahan Militer adalah pelaksanaan yurisdiksi militer di suatu daerah atau daerah pendudukan baik secara langsung oleh orang-orang militer maupun secara tidak langsung oleh orang-orang sipil yang diangkat oleh pemegang kekuasaan (Depdibud,1991 : 2247)

Upaya mengontrol dan mengelola daerah pendudukan agar tujuan pendudukan dapat tercapai maka dibentuk Pemerintahan Militer yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang tentara. Pemerintahan Militer di Lampung dipimpin oleh kolonel Kurita sebagai kepala pemerintahan/keresidenan.

“Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu :1) Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Kedua Puluh Lima) untuk wilayah Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. 2) Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Keenambelas) untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. 3) Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku dengan pusatnya di Makasar”.(Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993:5)

Pemerintahan Militer Jepang di Lampung menguasai segala aspek pemerintahan serta sarana dan prasarana umum sehingga memiliki kewenangan penuh dalam menentukan segala bentuk kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Militer adalah kelompok atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang yang menguasai daerah Lampung pada masa pendudukan setelah peperangan dengan pemerintah Kolonial Belanda sebagai penguasa Lampung sebelumnya.

Pendudukan adalah dalam hukum perang, penempatan satuan angkatan perang, di suatu tempat atau daerah yang direbut untuk keperluan pertahanan, atau untuk menjaga tata tertib dan keamanan di masa perang. Biasanya pemerintah beralih ke tangan panglima- panglima tentara musuh. Hak- hak kekuasaan tentara serta pemerintah pendudukan diatur dalam peraturan- peraturan perang darat. (Depdikbud, 1991:26-29). sedangkan W.J.S. Poerwadarminta (1984:731) mendefinisikan Pendudukan merupakan perbuatan yang menyangkut hal dan sebagainya menduduki suatu daerah dengan menggunakan tentara.

Jadi yang dimaksud dengan Pendudukan adalah penguasaan suatu wilayah secara paksa untuk keperluan pertahanan yang dilakukan oleh militer pada masa perang. dalam hal ini wilayah yang dimaksud adalah wilayah Lampung

“Militer adalah suatu kelompok atau organisasi yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran pada medan peperangan yang dibedakan dari orang-orang sipil” (Yahya A Muhaimin,1982:1). Sedangkan Amos Perlmutter (2000 :2) mendefinisikan Militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-

usaha organisasi itu. Militer adalah suatu profesi sukarela arena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan didalamnya, namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada situasi hirarki birokrasi. Dari kedua konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Militer merupakan sebuah institusi dan komponen yang melayani kepentingan umum, dan dalam hal ini mereka bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara.

Abdoel Fattah (2005 : 41) menyatakan bahwa peranan militer adalah sebagai alat negara yang menjaga keutuhan dan kedaulatan negara untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Hal ini berarti bahwa militer memiliki peranan sebagai pertahanan keamanan yang menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dari ancaman serta gangguan dari bangsa dan negara lain, termasuk adanya pergolakan dan pemberontakan.

Jadi dimaksud dengan Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang dalam penelitian ini adalah usaha penguasaan suatu wilayah secara paksa dan disiplin yang dilakukan oleh militer Jepang pada masa pendudukannya di wilayah Lampung.

#### **F. Konsep Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**

Proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada rakyat/permakluman (W.J.S Poerwadarminta 1982 :521). Proklamasi adalah kata perjuangan yang universal, proklamasi merupakan suatu istilah patriotik dalam bentuk tekad untuk meraih

kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah. Khalid Rasyidi (1979:30) menyatakan bahwa “Proklamasi 17 Agustus 1945 tidaklah datang dengan sendirinya. Proklamasi Kemerdekaan kemunculannya bukan merupakan suatu spontanitas juga bukan suatu monumen historik yang dalam meraihnya dapat terjadi secara implisit tidak melalui gelombang proses sebelumnya”, sedangkan C.S.T kansil (1985:44) mendefinisikan Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hakekatnya adalah jembatan emas kemerdekaan.

Adapun arti daripada proklamasi itu dalam garis besarnya ialah :

- a. Saat pencetusan revolusi rakyat Indonesia yang terus bergejolak.
- b. Lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dasar dan dorongan revolusi yang membawa kebenaran atas dan tujuan.
- d. Puncak perjuangan rakyat yang menyatakan kematangan pemikiran, Pengorganisasian setelah berjuang berpuluh-puluh tahun sebelum 17 Agustus 1945.
- e. Titik tolak daripada pelaksanaan amanat rakyat.  
(C.S.T Kansil 1984 : 45-46)

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia barulah dapat dilaksanakan setelah pemuda membawa calon-calon pertama presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ke daerah pengasingan ( B.M Diah.1987:52). Setelah melalui proses yang panjang dengan puncak kegiatan sebelum Proklamasi yaitu peristiwa Rengas Dengklok maka para tokoh pergerakan nasional kemudian berkumpul di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda. Di kediaman perwira militer Jepang inilah suatu peristiwa sejarah terjadi, yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi itu dirumuskan tiga orang pemimpin golongan tua yaitu Ir.Soekarno, Drs. Moh Hatta dan Mr.Ahmad Subardjo yang disaksikan beberapa tokoh golongan muda, yaitu Sukarni, B.M Diah, dan Sudiro serta beberapa orang

Jepang. Setelah naskah teks proklamasi disusun , maka timbullah perdebatan tentang siapa yang menandatangani naskah proklamasi tersebut, maka Sukarni bersama pemuda-pemuda lainnya dapat meyakinkan peserta rapat bahwa penandatanganan proklamasi ialah cukup Ir.Soekarno dan Drs.Moh Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Dari usul Sukarni tersebut tampak jelas bahwa peranan golongan muda memang cukup signifikan dalam proses menuju proklamasi kemerdekaan. Tepat pada hari jum'at 17 Agustus 1945 pukul 10.00 wib, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Ir.Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta dan disambut dengan rasa haru oleh seluruh rakyat Indonesia. Berita akan Proklamasi Kemerdekaan Indonsia kemudian disebarluaskan keseluruh nusantara dan penjuru dunia oleh para pemuda melalui radio, surat kabar, famflet, dan lain sebagainya. Peristiwa Proklamasi tersebut berlangsung kurang lebih hanya satu jam dengan suasana penuh rasa khidmat sekalipun sangat sederhana namun peristiwa tersebut telah membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Kemerdekaan adalah kebebasan, dimana sebuah negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya. Maka dapat disimpulkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan adalah simbol atau pernyataan yang menandakan suatu negara telah memasuki suasana yang bebas dan merdeka tanpa jajahan dari negara lain dalam hal ini yang dimaksud adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

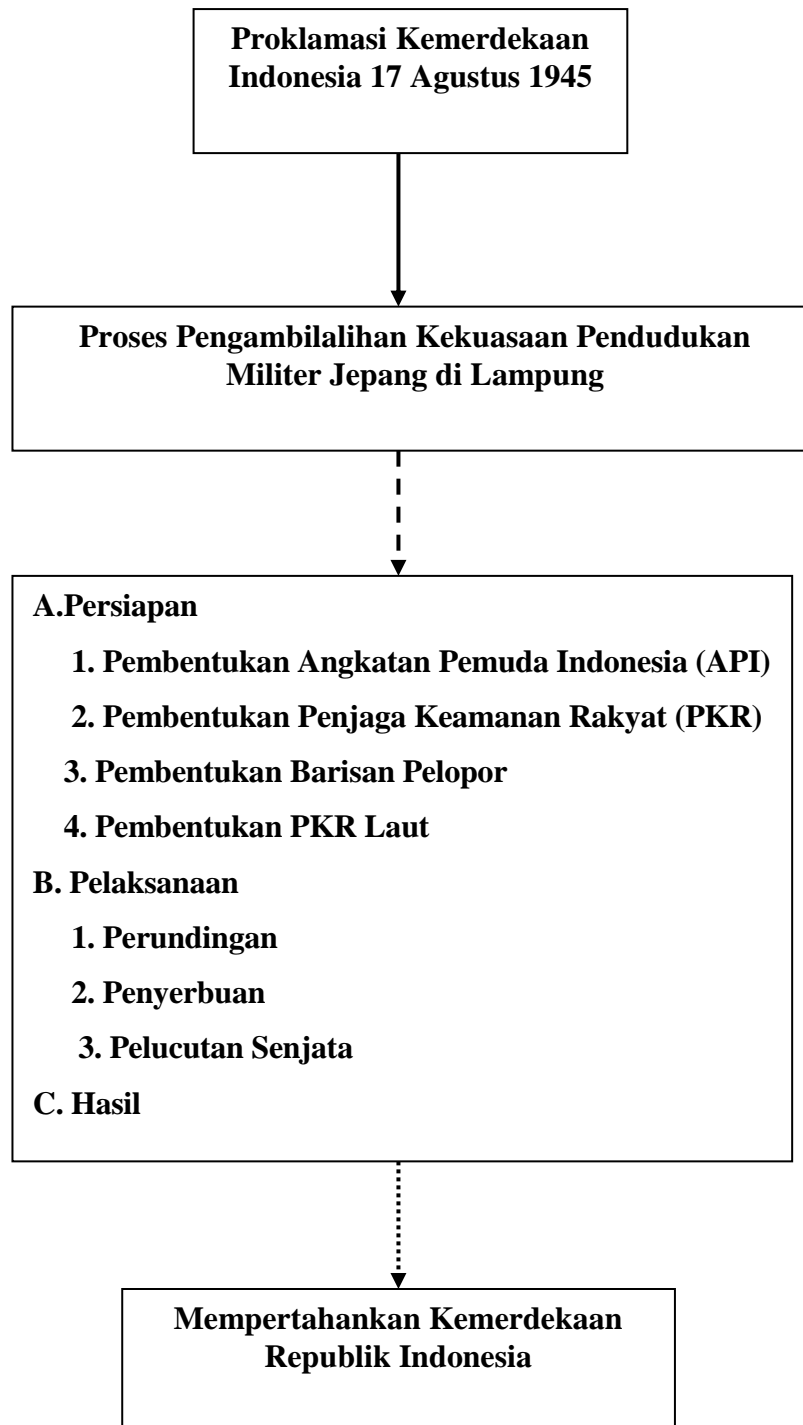
### **G. Kerangka pikir**

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan simbol yang menandakan bahwa bangsa Indonesia telah berada dalam suasana yang bebas dan merdeka. Demikian pula yang terjadi di daerah Lampung, berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia baru secara resmi diumumkan oleh Mr. Abbas pada tanggal 24 Agustus di hotel Juliana Tanjung Karang, namun Jepang tidak dengan mudah meninggalkan wilayah pendudukan pemerintahannya. Hal ini dapat di buktikan dengan usaha Jepang mempersulit komunikasi yaitu dengan penyegelan radio-radio dan Pemerintahan Militer Jepang masih berkuasa di daerah Lampung.




Berdasarkan hal di atas maka dilakukanlah Pengambilalihan Kekuasaan Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang di Lampung yang dilakukan dengan beberapa tahapan . *pertama*, tahap persiapan yang meliputi pembentukan Laskar-Laskar perjuangan seperti : API (Angkatan Pemuda Indonesia), PKR (Penjaga Keamanan Rakyat), Barisan Pelopor dan TKR- Laut . *kedua*, tahap pelaksanaan Pengambilalihan Kekuasaan Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang yang meliputi Perundingan, Penyerbuan dan Pelucutan Senjata. *Ketiga* adalah hasil-hasil yang didapatkan dalam upaya pengambilalihan kekuasaan meliputi segala prasarana umum maupun yang menyangkut pemerintahan yang pada saat itu dikuasai oleh Pemerintahan Militer Jepang. Adapun Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.



## H. Paradigma



Keterangan :

- a.  garis Pengaruh
- b.  garis Akibat
- c.  garis Tujuan